



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Masrukin, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pamekasan, 01 November 2023  
Pihak Kesatu,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	Indeks SPBE	3,5 < 3,9
	Meningkatnya Kematangan Domain SPBE	Tingkat Kematangan Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi)
		Tingkat Kematangan Indeks Domain Layanan SPBE	3 (Transaksi)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana yang Terpenuhi	100%
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 OPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	10 ASN
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	1 Kantor
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	7 Unit
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	10 Jasa
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 Gedung

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Administrasi pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Komunikasi	3 Terdefinisi
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3 Terdefinisi
10.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
11.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Informatika	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Perencanaan dan Strategi	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek TIK	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	3 (Terdefinisi) poin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
13.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (e-government)	95%
14.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Statistik	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Penerapan Manajemen SPBE	3 (Terdefinisi) poin
15.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%
16.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Indeks Aspek Kebijakan Internal Urusan Persandian	3 (Terdefinisi) poin
		Tingkat Kematangan Indeks Aspek Audit TIK	3 (Terdefinisi) poin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,1 poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.814.774.480	APBDP
2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 95.000.000	APBDP
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.259.038.479	APBDP
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. -	APBDP
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 57.500.000	APBDP
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 23.627.500	APBDP
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.291.608.501	APBDP
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 88.000.000	APBDP
9. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 2.578.000.000	APBDP
10. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.578.000.000	APBDP

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
11. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 3.355.000.000	APBDP
12. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.215.000.000	APBDP
13. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 140.000.000	APBDP
14. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 259.620.400	APBDP
15. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 259.620.400	APBDP
16. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 55.000.000	APBDP
17. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.000.000	APBDP

Pihak Kedua,

Masrukin, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 01 November 2023  
Pihak Kesatu,

  
Drs. Nur Hidajatul Firdaus, M.Si  
NIP. 19710707 199101 1 003